

PELEMBAGAAN PARTAI NASDEM

Oleh: Yudistira¹

Latar Belakang

Pasca reformasi pertumbuhan partai politik baru tumbuh subur seperti jamur bermunculan. Bahkan pada Pemilu 1999, partai politik peserta Pemilu tidak kurang dari 45 partai. Angka tersebut tentu merupakan jumlah yang besar untuk negara dengan sistem presidensial seperti Indonesia, padahal dalam berbagai literatur sistem pemerintahan presidensial tidak didesain untuk sistem politik multi partai. Keseimbangan pemerintahan menjadi esensi yang diusung pada sistem pemerintahan presidensial. Oleh karenanya, sistem politik yang digunakan lebih cocok menggunakan sistem dua partai seperti di Amerika. Uniknya, di Indonesia *pakem* ini tidak berlaku dan menjadi kekhasan sendiri bagi sistem politik dan pemerintahannya yang mengelaborasi antara sistem presidensial dengan sistem politik multi partai.

Akan tetapi, kelembagaan sistem tata negara Indonesia kemudian menginjak fase baru. Pertumbuhan partai politik diredam dengan serangkaian peraturan dan syarat yang ketat dalam sebuah undang-undang partai politik dan Pemilu. Eforia politik yang dirasakan beberapa tahun pasca reformasi kini dihadapkan pada sebuah stabilitas politik dan pemerintahan dengan mengurangi jumlah partai politik di parlemen. Upaya ini sering juga disebut *parliamentary threshold* yakni partai politik harus memenuhi ambang batas tertentu untuk bisa masuk ke DPR dan membentuk fraksi tersendiri. Ada juga *electoral threshold* yang membatasi partai politik berdasarkan dukungan elektoral pada saat pendaftar ke KPU dan ke Kemenkumham.

Partai NasDem lahir di tengah ketatnya persyaratan dan persaingan antar partai dalam politik. Secara eksplisit, kandungan pasal di dalam UU No. 2 tahun 2011 sangat sulit bagi partai politik baru lahir. Persyaratan yang paling memberatkan diantaranya adalah pembentukan minimal 2,5 tahun sebelum Pemilu, memenuhi 75% kepengurusan Kabupaten/Kota setiap provinsi, dan 50% kepengurusan kecamatan di masing-masing kabupaten/kota. Belum lagi pada UU no 8 tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD yang mensyaratkan partai politik harus mempunyai keanggotaan 1000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik.

Namun, Partai NasDem berhasil melalui persyaratan tersebut dan menjadi partai politik baru yang berhasil lolos verifikasi Kemenkumham dan KPU. Cerita kesuksesan ini tentu membuat persaingan menuju 2014 menjadi lebih semarak. Artinya, sedikit banyaknya Partai NasDem sebagai pemain baru dalam peta politik Indonesia berpotensi untuk merubah peta politik yang ada. Alhasil, penelitian mengenai pelebagaan Partai NasDem pun menarik untuk dikaji secara komprehensif. Dengan begitu kita bisa melihat proses dibalik keberhasilannya menjadi Peserta Pemilu 2014.

Jurnal yang berjudul "Pelebagaan Partai NasDem" ini dibuat berdasarkan kerangka acuan teori *historical institutionalism*. Oleh karena itu, cakupan kajiannya lebih dari cerita suksesnya Partai NasDem dalam memenuhi serangkaian verifikasi dalam UU No. 2 tahun 2011 tentang partai politik dan UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Motif politik, interaksi antar aktor politik, konvensi-konvensi yang melatari terbentuknya partai, struktur informasi, serta dinamika di dalamnya adalah kajian yang akan menjadi cerita tersendiri dalam sebuah proses pelebagaan Partai NasDem. Terlebih memang Partai NasDem dikenal sebagai partai baru yang memiliki riwayat dinamika dan konflik internal yang cukup hebat menjelang Pemilu 2014.

Terdapat beberapa faktor yang terus mendorong lahirnya Partai NasDem diantaranya ada desakan dari beberapa kalangan untuk segera membentuk partai, lahirnya UU No. 02 tahun 2011 tentang Partai Politik, serta upaya dari partai lain yang mencoba menjegal partai baru lahir. Ketiga faktor tersebut kemudian menstimulasi beberapa kader Ormas Nasional Demokrat untuk mendirikan Partai NasDem dengan dukungan penuh Surya Paloh. Uniknya, perjalanan partai baru ini mengalami masa-masa sulit pada proses pelebagaannya dimana resistensi dan konflik

¹ Jurnal ini dibuat untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya

kepentingan menjadi penggalan sejarah yang membawa warna tersendiri. Pada awal pembentukan, resistensi muncul dari internal Ormas Nasional Demokrat yang kurang menyambut pembentukan Partai NasDem. Walau beragam tanggapannya, akan tetapi resistensi tersebut memiliki implikasi yang paling buruk bagi dua organisasi yang sama-sama sedang membangun kepercayaan publik. Ormas Nasional Demokrat mulai ditinggalkan para kadernya seiring mundurnya Sri Sultan Hamengkubuwono X. Sedangkan Partai NasDem sebagai entitas yang berbeda dari Ormas mengalami masa-masa sulit ketika dukungan dari Ormas Nasional Demokrat hanya 15%. Namun, permasalahan tersebut tidak menjadi soal terlebih Partai NasDem membuktikan mampu lolos pada verifikasi Kemenkumham dan KPU. Pada fase berikutnya, konflik kepentingan terjadi antara kubu Harry Tanoesudibyo dan Surya Paloh. Konflik tersebut terjadi pada pra Kongres Pertama Partai yang terdiri dari beberapa motif politik pasca wacana pengusungan Surya Paloh sebagai Ketua Umum pada Kongres.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah *bagaimana proses pelebagaan partai NasDem dari mulai mengkonsolidasikan kepentingan, aktor, hingga menjadi partai politik peserta Pemilu 2014?*

Kerangka Teoritik

Kerangka teori dalam penelitian mengenai pelebagaan partai NasDem kemudian dikerucutkan kembali pada sebuah teoritik yang lebih spesifik yaitu melihat pelebagaan dari perspektif *historical institutionalism*. Kesejarahan mengenai ini sangat penting untuk dikaji terlebih karena partai baru dengan segala dinamikanya. Hal ini yang menjadikan partai NasDem “unik” dengan segala perubahan format institusi hingga pola koordinasi antar individu setelah konflik internal partai. Selain itu, ada hal yang paling penting dari serangkaian peristiwa tersebut adalah melihat bagaimana struktur informal yang ada di tubuh partai hingga kemudian struktur informal tersebut pecah dan menjadi konflik. Oleh karenanya, fenomena politik tersebut hanya bisa dijelaskan melalui kerangka teoritik *historical institutionalism* dengan seperangkat konsep yang menelaah mengenai perubahan institusi yang diakibatkan dari dinamika institusi dalam setiap rutinitasnya.

Hall dan Taylor memiliki pendapat bahwa *historical institutionalism* menganggap institusi politik secara luas dan tertarik pada perubahan-perubahan dalam institusi sepanjang waktu². Namun hall dan Taylor juga menegaskan bahwa *historical institutionalism* mendefinisikan institusi sebagai prosedur formal atau informal, rutinitas, norma-norma, dan konvensi-konvensi yang terikat dalam struktur-struktur organisasi dari politik maupun ekonomi politik³. Rangkaian kejadian serta hal-hal yang terikat dalam sebuah institusi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam memandang institusi, dimana dinamika melibatkan rutinitas, norma, konvensi-konvensi baik itu dalam kelompok maupun yang sudah tertanam di masing-masing individu.

Rutinitas atau kegiatan yang dilakukan dari hari-kehari dan berlangsung lama akan menciptakan sebuah catatan penting bagi jalannya organisasi dan akar kesejarahan institusi. Di dalamnya, akan ada dinamika antar individu baik itu berupa friksi atau lebih jauh lagi konflik antar faksi. Hal ini yang menjadi kejadian penting karena setiap rutinitas keseharian akan memiliki cerita berbeda dari waktu ke waktu. Sedangkan norma adalah sebuah aturan atau ketentuan yang mengikat individu per individu dalam partai politik yang dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dengan kaidah yang berlaku⁴. Semuanya terikat baik dalam bentuk norma tertulis ataupun memang tidak tertulis dan salah satu norma tersebut dihasilkan melalui konvensi-konvensi yang menentukan sikap dan karakter khas partai. Selain itu, konvensi juga berkaitan dengan kebijakan atau aturan hasil dari mufakat. Semuanya menjadi satu kesatuan

² John T. Ishiyama dan Marjke Breuning. *Op. Cit.* hlm.42

³ Peter A. Hall dan Rosemary C. R. Taylor. “Political Science and the Three New Institutionalisms”. MPIFG Scientific Advisory Board. ISSN 0944-2074. 1996.

⁴ Diunduh dari web <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>, tanggal 17 Maret 2014

dalam sebuah definisi *historical institutionalism* tentang bagaimana institusi menemukan bentuk dalam perjalanannya.

Peters mengabsahkan pendapat Hall dan Taylor, ia mengutip Krasner mengenai ketergantungan satu sama lainnya. Dalam memahami pergerakan dan perkembangan institusi terdapat istilah '*path dependency*' yakni semacam benang merah dimana kebijakan politik yang dikeluarkan akan sangat berhubungan dengan masa kini dan masa depan institusi tersebut⁵. Bukan hanya dalam segi hasil dari kebijakan, namun pengaruhnya juga sangat kuat dan tertanam dalam setiap individu di dalamnya. Tetapi begitupun institusi yang kompleks ini terdiri dari individu yang mempunyai preferensi, tentu '*path dependency*' ini juga menyangkut bagaimana hambatan bahkan juga bisa merubah terhadap tujuan dan juga kebijakan itu akan ada.⁶

Pada tahap berikutnya institusi bergerak stabil dan tidak ada permasalahan yang berarti. Istilah itu disebut '*punctuated equilibria*' yakni sebuah keseimbangan yang dialami oleh sebuah institusi dan secara periodik "*punctuated*"⁷. Namun secara harfiah "*punctuated equilibria*" diartikan sebagai titik keseimbangan yang menandakan rutinitas institusi yang tidak ada konflik. Istilah *punctuated equilibria* diadopsi Peters dari pemikiran neo-evolusi biologi Darwin bahwa sebuah ketergantungan organisme terhadap lingkungannya dan perlahan akan merubah organisme itu sendiri dalam proses yang panjang. Akan tetapi, proses keseimbangan yang dimaksud Peters ini bisa setelah terjadi perubahan atau menjelang perubahan dari sebuah institusi.

Proses keseimbangan institusi didapat ketika institusi tersebut mampu untuk bisa responsif terhadap apa yang menekan dan menuntut institusi keluar dari konservatismenya. Perubahan untuk mencapai kesana disebut Peters sebagai "*critical juncture*" atau saat-saat kritis yang menjelaskan bagaimana perubahan institusi terjadi. Apabila dianalogikan dengan sederhana, *critical juncture* diartikan sebagai kehendak atau gejolak pada proses institusi mengalami perubahan baik itu bentuk ataupun dari hal yang bersifat konservatif. Intensitas dari gejolak internal dalam proses ini dianggap sebagai signal hingga terakumulasi dalam sebuah peristiwa (*conjuncture*). Dan di dalam tubuh partai politik tentu terdiri dari beragam kekuatan yang terhimpun dalam faksi-faksi, dan perubahan tidak akan terjadi terkecuali adanya *conjuncture* dari berbagai kekuatan politik untuk melakukannya. Sehingga perubahan tersebut tidak dilakukan oleh segelintir orang saja namun terdiri dari akumulasi kekuatan besar didalamnya⁸.

Pembahasan

Tanggal 8 Januari 2013 merupakan tonggak penting bagi Partai NasDem sebagai partai politik baru yang lolos sebagai peserta Pemilu 2014⁹. Peristiwa tersebut menjadi perhatian publik terutama bagi partai politik lama karena mengubah peta politik di Indonesia dengan hadirnya kekuatan politik baru. Apabila menghitung mundur, hanya dalam rentang waktu dua tahun yakni tahun 2011 sampai 2013 Partai NasDem mampu mentransformasikan diri sebagai partai yang berbadan hukum serta berhasil melalui tahapan-tahapan teknis seperti yang termaktub dalam UU No. 2 tahun 2011 tentang partai politik yakni satu tahapan oleh Kemenhukham dan dua tahapan verifikasi dari KPU¹⁰. Hal tersebut merupakan pencapaian yang luar biasa bagi partai politik baru terlebih dalam pelembagaannya Partai NasDem penuh dengan dinamika.

Penelitian ini melihat bahwa bentuk dan proses pelembagaan Partai NasDem sangat kompleks, sehingga penelitian ini berpijak bukan hanya proses pelembagaan dalam rangka memenuhi regulasi saja tetapi lebih jauh lagi yakni mencermati perubahan institusinya sepanjang

⁵ Guy Peters, *Op. Cit.* hlm. 63

⁶ John T. Ishiyama dan Marjke Breuning, *Loc. Cit.* hlm. 42

⁷ Evrim Guel, "Turkey and the West: Change in Continuity? A Two-way Approach to Turkey's Relations with the West" _____. Lund University Department of Political Science. _____. hlm. 10

⁸ Guy Peters, *Op. Cit.* Hlm. 69

⁹ Hasil Rekapitulasi Verifikasi Faktual Partai Politik tertanggal 8 Januari 2013 dengan No 05/BA/II/2013 dan berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 menyatakan Partai NasDem, PPP, PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKS, PKB, PBB, Partai Demokrat, PAN, PKPI, Gerindra, Hanura memenuhi syarat sebagai Partai Politik peserta Pemilu 2014.

¹⁰ Tahapan pertama adalah verifikasi dari Kemenhukham yang sesuai dari UU No. 2 tahun 2011. Tahapan kedua adalah Verifikasi administrasi oleh KPU, ketiga adalah Verifikasi Faktual dan yang terakhir adalah penentuan nomor urut sebagai peserta Pemilu.

waktu dan dinamikanya. Inilah yang menjadi urgensi bagi peneliti untuk bisa mengikuti bagaimana proses-proses dan perubahan pelebagaan partai NasDem baik sebelum menjadi partai politik maupun sesudah terbentuk. Dengan begitu, pelebagaan Partai NasDem sangat tepat menggunakan kerangka teoritik *historical institutionalism* untuk memaksimalkan pisau analisis dalam memahami proses pelebagaannya.

Dalam akar sejarahnya, banyak yang harus dilalui Partai NasDem mulai dari proses pra pendirian, proses pelebagaan, konflik internal hingga proses konsolidasi dalam rangka membuat strategi pemenangan partai menjelang Pemilu 2014. Berbagai peristiwa yang dilalui Partai NasDem tersebut membuat kajian historis sangat mengakar. Hal ini disebabkan karena dinamika internal partai NasDem begitu cepat berlalu dan kemudian cepat bangkit pula guna sukseksi Pemilu.

Pada pra pendirian, Ormas Nasional Demokrat sebagai lembaga yang melahirkan para pendiri Partai NasDem harus mengalami masa-masa sulit yakni ditinggalkan oleh insiatornya Sri Sultan Hamengkubuwono X, serta non aktifnya beberapa deklaratornya seperti Khofifah Indarparawansa, Anies Baswedan, Ahmad Syafii Maarif, Didik J. Rachbini, dan Budiman Sudjatmiko serta pengurus-pengurus daerah lainnya. Sebabnya adalah dalam perjalanan membangun dan memperkuat Ormas Nasional Demokrat kemudian lahir partai NasDem yang mempunyai tujuan, ide dan gagasan yang sama dengan Ormas NasDem serta sekretariat di alamat yang sama pula.

Pertanyaan yang kemudian timbul adalah apakah lahirnya Partai NasDem memang diinginkan atau sebaliknya? Jawabannya sudah pasti beragam, karena tentu para aktor politik yang tergabung dalam Ormas Nasional Demokrat memiliki motif yang berbeda dalam menghadapi situasi seperti itu. Peristiwa tersebut menjadi ujian pertama dalam pra pendirian Partai NasDem, bahkan dalam dinamikanya terjadi fragmentasi di dalam tubuh Ormas Nasional Demokrat antara tiga opsi dalam menentukan sikap terhadap pembentukan Partai NasDem. *Pertama*, opsi yang menginginkan Ormas NasDem untuk tetap pada bentuknya dan tidak dalam posisi berpolitik praktis. Hal ini menyangkut dengan peran dan tujuan dari sebuah gagasan besar restorasi tidak diukur dalam keterlibatannya di dalam hiruk pikuk politik praktis namun akan lebih baik dalam Ormas. Sedangkan yang *kedua* adalah opsi supaya Ormas seutuhnya terlibat dalam politik dengan mentransformasikan lembaganya sebagai partai politik secara utuh. Alasan yang mendukung opsi kedua ini berdasarkan sebuah keyakinan bahwa restorasi akan terwujud melalui kekuasaan. *Ketiga* adalah opsi yang dianggap sebagai akomodatif. Opsi ini menekankan penyatuan kubu yang setuju membentuk partai dan yang tidak untuk kemudian melebur menjadi kesatuan Ormas Nasional Demokrat dan mengamini pula adanya gagasan untuk mengeksekusi nilai-nilai ideologi restorasi dalam bentuk Partai Politik. dengan kata lain, opsi ketiga ini menyebutkan bahwa Ormas tetaplah Ormas dan Partai NasDem sebagai entitas yang berbeda dari Ormas.

Pilihan sulit waktu itu harus diputuskan oleh Surya Paloh sebagai Ketua Umum untuk menentukan arah dan langkah kedepannya Nasional Demokrat. Pilihannya tentu antara menjadi Ormas seutuhnya, menjadi partai politik, atau menapaki keduanya yakni sebagai Ormas dan Partai politik yang berjalan beriringan. Atas berbagai pertimbangan akhirnya Surya Paloh memutuskan untuk memilih opsi ketiga dimana keduanya adalah jalan perjuangan dalam memasifikasi gerakan perubahan restorasi. Konsekuensi logis dari kebijakannya tersebut kemudian berdampak pada mundurnya sebagian basis-basis massa Ormas Nasional Demokrat yang merasa kecewa apalagi keanggotaannya ada yang berasal dari PNS.

Walaupun demikian, Partai NasDem masih tetap mendapatkan simpati dari masyarakat lewat perkenalannya sebagai partai politik baru di stasiun-stasiun televisi. Gelombang massa yang menjadi anggota baru baik di tingkat pusat sampai daerah tidak terbendung lagi karena antusiasme masyarakat semakin tinggi. Pada tataran pusat, Hary Tanoesoedibyo hadir menjadi orang baru dan langsung mengisi posisi Ketua Dewan Pakar Partai NasDem.

Partai NasDem terus bergerak dengan terus mengupayakan kuantitas anggota bisa menunjukkan tren yang positif. Tetapi sebenarnya kematangan institusi belum teruji seperti suprastruktur dan infrastruktur untuk bisa mengakomodasi berbagai kekuatan dengan berbagai kepentingan politik. hal ini bisa dilihat dari fenomena friksi antar kelompok di internal Partai NasDem. Keadaan tersebut kemudian berkembang menjadi konflik antara loyalis Surya Paloh dan Hary Tanoesoedibyo beberapa hari sebelum Kongres I Partai NasDem 23-26 Januari 2013¹¹. Konflik besar di internal partai tidak bisa dipecahkan melalui instrumen organisasi hingga fragmentasi untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing pun tidak terelakan. Bahkan

¹¹ Yulistira. "Laporan Praktik Kerja Nyata, O250 Sebagai Strategi dan Taktis Sukseksi Pemilu 2014 Partai NasDem" FISIP Universitas Brawijaya. 2013 hlm. 23

dalam jumpa pers yang diadakan di Aula Museum Adam Malik, Hary Tanoesoedibyo mengungkapkan konflik tersebut seperti perang di dalam organisasi dan tidak bisa dibendung lagi.¹² Klimaksnya Hary Tanoesoedibyo selaku Ketua Dewan Pakar Partai NasDem menyatakan mundur pada tanggal 17 Januari 2013. Menyusul dibelakangnya 3 pejabat teras Partai NasDem menyatakan mundur melalui surat pengunduran diri seperti Sekretaris Jendral Ahmad Rofik, Wakil Sekretaris Jendral Saiful Haq, dan Ketua Internal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Endang Tirtana.

Faktanya, konflik tersebut sebenarnya terbangun dari berbagai motif politik antara yang mendukung pengusungan Surya Paloh sebagai Ketua Umum dengan yang menolak. Gesekan demi gesekan terjadi ditataran pejabat teras dimana friksi terus melebar hingga “perang terbuka” pun terjadi. Upaya untuk meredakan konflik dilakukan dengan proses mediasi yang diadakan di Hotel Grand Hyatt tanggal 16 Januari 2013 dengan mediatornya adalah Rosano Barack. Pada proses ini, Hary Tanoesoedibyo bersedia untuk tidak menjadi ketua Majelis Partai bahkan Capres dari Partai NasDem dan beberapa persyaratan lain dalam materi kompromi. Proposal berisi sebuah syarat untuk posisi Ketua Majelis Nasional Partai (MNP) harus diisi oleh orang lain bukan Jan Darmadi dan Sekretaris Jendral tetap Ahmad Rofik serta menganulir pemecatan Syaiful Haq. Namun proposal tersebut tidak ditanggapi oleh Surya Paloh padahal upaya tersebut merupakan titik kompromi diantara keduanya.

Surya Paloh memiliki alasan kuat untuk tidak menanggapi proposal tersebut karena kelompok dari Hary Tanoesoedibyo telah melakukan kegiatan yang inkonsensus. Setidaknya ada 3 kegiatan yang tersembunyi tanpa kesepakatan dilakukan oleh Hary Tanoesoedibyo. *Pertama*, bulan Juni 2012 Hary Tanoesoedibyo melakukan janji politik dengan memodali para caleg NasDem 5 milyar sampai 10 milyar rupiah. *Kedua*, menonjolkan sosok Hary Tanoesoedibyo dalam media iklan yang sering dilakukan oleh partai NasDem untuk memperkenalkannya ke publik di stasiun televisi MNC Grup. Padahal, dalam konsensus, sosok partai yang harus ditonjolkan bukan sosok-sosok perorangan. *Ketiga*, Hary Tanoesoedibyo melakukan beberapa kali pertemuan dengan DPW-DPW tanpa sepengetahuan para deklaratour partai, sehingga memunculkan sebuah fragmentasi yang jelas antara beberapa DPW.

Pertemuan pertama diadakan di Restoran Bunga Rampai, Menteng, Jakarta Pusat, 16 Desember 2012. Pertemuan tersebut digagas oleh Hary Tanoesoedibyo dan diikuti oleh Ketua Umum Caprice Rio Capella, Sekjen Ahmad Rofik, dan 11 DPW, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara. Tiga hari berikutnya, rapat tersebut ditindaklanjuti lagi dengan pertemuan di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan. Rapat lanjutannya digelar lagi di Menara MNC, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Agenda Rapat tersebut membahas setidaknya satu hal yang sensitif, yaitu amanat sebagian DPW kepada Hary Tanoesoedibyo untuk menyelamatkan Partai Nasdem dan menjalankan roda partai sebagaimana sistem yang ada, dan wacana menghentikan biaya operasional partai bagi para penentang ide ini yaitu bagi para pendukung Surya Paloh.

Tentunya, mundurnya pejabat teras partai NasDem menimbulkan dampak yang sistemik bagi kader-kader di daerah. Hal ini disebabkan konstituensi Hary Tanoesoedibyo yang dilakukannya selama menjadi Dewan Pakar Partai NasDem dengan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan pengurus daerah berhasil menghasilkan pendukung yang kuat. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Barat Rustam Effendi menjadi pejabat teras daerah pertama yang menyatakan mundur beberapa jam setelah pernyataan mundur Hary Tanoesoedibyo¹³. Kemudian disusul Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta Armin Gultom serta dari beberapa pengurus dan anggota daerah lainnya seperti Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Bone, Kota Cimahi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung barat serta daerah lain dengan jumlah yang tak kalah banyaknya¹⁴.

Tidak hanya dalam struktural partai, konflik terus mengamuka hingga terjadi pada sayap-sayap partai diantaranya terjadi pada Badan Advokasi Hukum (BAHU) NasDem dan Garda Pemuda NasDem. Tercatat 15 pengurus Dewan Pimpinan Pusat dari Badan Advokasi Hukum

¹² Diunduh melalui web <http://www.gatra.com/fokus-berita/23575-perang-petinggi-partai-nasdem.html>, pada tanggal 1 Maret 2014

¹³ Diunduh melalui web <http://news.detik.com/read/2013/01/25/071414/2151694/10/para-pengurus-partai-nasdem-dki-dan-jakarta-roya-mundur>, pada tanggal 2 Maret 2014

¹⁴ Diunduh melalui web <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/01/30/mhfhq1-ramairamai-kader-nasdem-mengundurkan-diri-ini-alasannya>, pada tanggal 2 Maret 2014

(BAHU) NasDem mengundurkan diri¹⁵ dengan digawangi oleh Effendy Syahputra sebagai ketua. Di Garda Pemuda NasDem pengurus dari Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat ramai-ramai mengundurkan diri¹⁶.

Ramainya pengunduran diri dari pengurus sayap-sayap partai menjadi indikasi bahwa konektifitas satu sama lainnya begitu kuat. Masing-masing terhubung dengan gerbongnya sendiri sehingga apabila hulu gerbongnya belok, hilir gerbong juga ikut berbelok. Hal ini menjadi sebuah Potret bahwa struktur partai terdiri dari beberapa kelompok dengan kekuatan politik masing-masing yang mengisi tataran pengurus partai hingga pengurus sayap-sayap partai. Gerbong tersebut ada yang sudah dibawa ketika masuk menjadi bagian partai NasDem maupun secara alamiah terjadi peleburan gerbong di tubuh partai. Namun memang tidak menutup kemungkinan juga banyak dari anggota partai maupun sayap-sayap yang berasal dari luar gerbong tersebut.

Ada sebuah pengharapan baru pasca perpecahan di tubuh partai yakni kehadiran anggota baru yang akan memperkuat internal partai. Pasca Kongres I, Sisa kekuatan yang dimiliki kemudian ditambah dengan kehadiran orang-orang baru yang bergabung menambah performa mesin partai. Berikut daftar orang-orang baru yang bergabung dengan partai NasDem.

Tabel 1.1 : Wajah Baru Pengurus DPP Partai NasDem

No	Nama	Jabatan sebelumnya	Jabatan di Partai NasDem
1	O. C. Kaligis	Advocat	Mahkamah Partai
2	Siti Nurbaya	Sekjen DPD	Kabid Otonomi Daerah
3	Nining Indra Saleh	Sekjen DPR RI	Wasekjen Bid. Kesekretariatan
4	Akbar Faisal	Partai Hanura dan Komisi II DPR RI	Kabid Politik Pemerintahan
5	Rahmawati Sukarnoputri	Partai Pelopor	Dewan Pertimbangan Partai

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Nama-nama diatas merupakan penambah energi baru bagi partai karena memiliki latar belakang yang baik. Hal ini baik untuk Partai NasDem dalam rangka konsolidasi internal partai saat perpecahan dan mempersatukan suara untuk Pemilu 2014. Rachmawati Soekarnoputri memiliki latar belakang sebagai politisi dari partai Pelopor yang tidak lolos verifikasi KPU memilih untuk bergabung dengan Partai NasDem dan diaduk menjadi Dewan Pertimbangan menggantikan Endriartono Sutarto yang diberhentikan karena mengikuti konvensi Partai Demokrat¹⁷. Dari unsur nonpartisan ada Siti Nurbaya yang sebelumnya sebagai Sekjen Dewan Perwakilan Daerah yang kemudian menjabat Ketua Bidang Otonomi Daerah Partai NasDem¹⁸ serta Nining Indra Saleh sebelumnya sebagai Sekjen DPR RI kemudian menjabat Wasekjen Bidang Kesekretariatan. Akbar Faisal yang sebelumnya anggota Komisi II DPR RI dari Partai Hanura mengundurkan diri dan bergabung pada barisan Pengurus DPP Partai NasDem yang menduduki jabatan Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan. Di posisi Mahkamah Partai diduduki oleh OC Kaligis yang memang sebelumnya sebagai pengacara.

Jajaran Pengurus DPP Partai NasDem baru turut menggerak partai pada tren yang positif. Ketika partai NasDem belum terbentuk dan masih menjadi organisasi kemasyarakatan (Ormas NasDem) jumlah anggotanya mencapai 4 juta¹⁹ orang. Jumlah keanggotaan tersebut terus berkembang hingga mencapai jumlah anggota aktif yang terdaftar dalam sistem database online-nya sebanyak 12.176.852 anggota²⁰. Pencapaian lain yang patut untuk disoroti adalah dari Litbang Kompas yang merilis hasil survey elektabilitas partai politik yang menempatkan Partai NasDem di posisi 5 dengan tingkat elektabilitas mencapai 6,9%²¹.

Kompas melakukan tiga periode survey untuk mengukur elektabilitas partai, periode pertama survey dilakukan di akhir tahun 2012, periode kedua pertengahan tahun 2013, dan periode ketiga

¹⁵ Diunduh melalui web <http://www.merdeka.com/pemilu-2014/potret/15-pengurus-badan-hukum-partai-nasdem-mengundurkan-diri.html>, pada tanggal 3 Maret 2013

¹⁶ Diunduh melalui web <http://news.okezone.com/read/2013/01/27/339/752401/garda-pemuda-nasdem-dki-jakarta-mundur-massal>, tanggal 5 Maret 2014

¹⁷ Diunduh dari web <http://news.detik.com/read/2012/09/16/181158/2021048/10/2/rachmawati-soekarnoputri-resmi-gabung-partai-nasdem>, tanggal 12 Maret 2014.

¹⁸ Lihat AD/ART Partai NasDem. hlm. 52

¹⁹ Yudistira. *Op. Cit.* Hlm. 72

²⁰ Lihat "Rekapitulasi jumlah kader Partai NasDem dari sistem database online O250" per 12 Agustus 2013

²¹ Lihat laman web <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/01/09/posisi-5-di-survei-nasdem-optimistis-tembus-tiga-besar> yang diunduh tanggal 4 Maret 2014.

dilakukan pada akhir tahun 2013. Hasilnya menempatkan progresifitas dari partai NasDem sebagai partai politik baru yang bergerak positif dan dinamis. Hanya dalam kurun waktu 1 tahun antara tahun 2012 dengan tingkat elektabilitasnya yang hanya 3,5% dan tahun 2013 meningkat hampir 2 kali lipat menjadi 6,9%. Hasil ini tentu memuaskan karena ada partai lain elektabilitasnya dibawah Partai Nasdem diantaranya Partai Hanura 6,6%, PKB 5,1%, PAN 3,2%, PPP 2,4%, PKS 2,3%, PBB 1,1%, dan PKPI 0,1%²².

Sebelumnya, catatan prestasi pernah Partai NasDem raih dengan kemampuannya melalui tahapan persyaratan partai politik peserta Pemilu 2014 dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik bisa dikatakan luar biasa bagi partai baru. Pasalnya, partai politik yang lahir pasca reformasi rontok berguguran karena ketatnya regulasi yang diatur dalam UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik. Dari 46 Partai Politik yang mendaftar ke KPU, hanya 12 partai politik nasional dan 3 partai politik lokal Aceh yang berhak untuk berkontestasi dalam Pemilu 2014. Proses pelebagaan Partai NasDem mampu memenuhi perundang-undangan dimulai dengan pemenuhan persyaratan perundang-undangan yang terdiri dari 3 tahapan. Proses ini merupakan proses penyederhanaan partai politik dalam Pemilu dengan regulasi yang ketat dimana dijelaskan dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang terdiri dari 3 tahapan.

Pertama adalah tahapan verifikasi yang dilakukan oleh Kemenkumham merupakan syarat konstitusional yang harus dilakukan sebagai lembaga Negara berdasarkan mandat UU No. 2 tahun 2008 *juncto* UU No. 2 tahun 2011 tentang partai politik. Di dalam UU tersebut diatur mengenai persyaratan yang wajib partai politik yang akan berlaga dalam Pemilu 2014 seperti dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Partai Politik. Dimana partai politik harus berbadan hukum serta memiliki akta notaris dengan memenuhi kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan yang paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan²³. Selain itu partai politik juga harus mempunyai kantor perwakilan dari tingkat pusat hingga daerah dan memiliki rekening atas nama partai.

Kedua merupakan tahapan verifikasi administrasi KPU. Tahapan ini merupakan awal dari serangkaian verifikasi sesuai petunjuk teknis verifikasi Partai Politik oleh KPU supaya melakukan verifikasi administrasi melalui mekanisme yang telah ditentukan. Pada verifikasi awal terdapat 34 parpol yang lolos dari total 46 parpol yang mendaftar sebagai peserta Pemilu 2014 di KPU. Satu di antaranya yang lolos verifikasi administrasi adalah Partai NasDem. Kemudian KPU pada hari Minggu 28 Oktober 2012 malam, akhirnya mengumumkan hasil verifikasi administrasi. KPU menyatakan ada 16 partai yang lolos maju ke tahap verifikasi faktual dan 18 partai gugur.²⁴ Ketiga, adalah tahapan dimana Partai NasDem lolos verifikasi faktual oleh KPU. Dalam Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik tertanggal 8 Januari 2013 dengan No 05/BA/I/2013 dan berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 menyatakan Partai NasDem dan 9 partai lain memenuhi syarat sebagai Partai Politik peserta Pemilu 2014.²⁵ Partai NasDem berhasil memenuhi 100% kepengurusan di 33 provinsi.²⁶

Tidak berhenti disana, pasca pengumuman KPU Partai NasDem melakukan berbagai pembenahan dalam struktur organisasinya. Namun terlepas dari itu semua, perjalanan panjang akan menjadi kesejarahan yang paling berarti bagi Partai NasDem. Dinamika kedepannya memang tidak akan mudah, namun Partai NasDem harus bisa belajar dari apa yang terjadi di masa lalu bahkan saat ini. Bisa jadi pula apa yang dilakukan oleh Partai NasDem dengan seperangkat kebijakannya akan sangat berpengaruh pada masa depan partai. Oleh karena itu karya tulis ini mencoba mengurai peristiwa penting yang menyangkut dengan pelebagaan yang tersaji pada beberapa kejadian yang melekat pada Partai NasDem.

²² Diunduh dari web <http://www.jpnn.com/read/2014/01/09/210034/Geser-Partai-Papan-Tengah,-NasDem-Incar-Posisi-Tiga-Besar->, tanggal 6 Maret 2014

²³ UU no 2 tahun 2011 tentang partai politik pasal 3 ayat 2

²⁴ Dikutip dari laman web <http://beta.partainasdemo250.org/partai/page/2>. diakses pada Selasa 22 Oktober 2013 pukul 23.50 WIB

²⁵ Dikutip dari laman web

<http://nasional.kompas.com/read/2013/01/08/02572488/KPU.Hanya.10.Parpol.yang.Penuhi.Syarat.untuk.Pemilu.2014> pada 27 September 2013 pukul 15.09 WIB

²⁶ Lihat Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik No 05/BA/I/2013

Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem yang hanya berjumlah 13 orang bukan struktur yang ideal. Tugas dan fungsi untuk menghadapi Pemilu 2014 akan terasa berat apabila dipikul oleh 13 orang pengurus saja. Hal ini diungkapkan oleh Patrice Rio Capella dalam sebuah diskusi dengan Surya Paloh jauh sebelum Kongres. Struktur ini dipertahankan sampai pemenuhan verifikasi KPU berakhir dan kemudian dibahas di Kongres dengan penambahan-penambahan pos untuk bisa mendukung program partai.

Dalam sejarahnya, struktur DPP seperti saat ini berawal dari dibentuknya *task force* atau bisa juga disebut tim transisi 6 bulan sebelum kongres dan bersifat *ad hoc*. Tim ini dipersiapkan sebagai pola dan bentuk dari struktur DPP dan akan dibubarkan pasca kongres pertama. Oleh karena itu Task Force ini disebut sebagai cikal bakal pengurus DPP Partai NasDem. *Task Force* beranggotakan 16 orang dengan beragam latar belakang seperti dari kalangan profesional ataupun dari kalangan Ormas Nasional Demokrat. Ke-16 anggota *task force* ini sama persis dengan orang-orang yang menjadi Ketua Bidang pada kepengurusan saat ini. Tugasnya adalah mempersiapkan materi untuk kongres seperti agenda acara, mempersiapkan infrastruktur, mengkonsep desain kepengurusan, serta strategi menghadapi Pemilu.

Tabel 6.1: Perbandingan Kepengurusan Sebelum dan Setelah Kongres

Struktur Lama	Struktur Baru
Ketua Umum Sekretaris Jendral Wakil Sekjen Bendahara Umum Wakil Bendahara Umum Kepala Kesekretariatan 4 Jabatan di Dewan Pembina Partai	Ketua Umum
	Kabid Pemilihan Umum Kabid OKK Kabid Media dan Komunikasi Publik Kabid Pendidikan Politik dan Kebudayaan Kabid Politik dan Pemerintahan Kabid Hukum, Advokasi dan HAM Ketua Bid Otonomi Daerah Ketua Bid Pertanian & Maritim Ketua Bid Pertahanan & Keamanan Ketua Bid. Energi, SDA & Lingkungan Hidup Ketua Bid. Agama & Masyarakat Adat Ketua Bid. Hubungan Luar Negeri Ketua Bid. Ekonomi & Moneter Ketua Bid. Kesehatan, Perempuan & Anak Ketua Bid. Industri, Perdagangan & Tenaga Kerja Ketua Bid. Olahraga, pemuda & Mahasiswa 16 Departemen
	Sekretaris Jendral
	Wasekjen Bid. Olahraga, Kaderisasi & Kaderisasi Wasekjen Bid. Internal & Kasekretariatan Wasekjen Bid. Renlitbang Wasekjen Bid. Eksternal
	Bendahara Umum
	Waben Bid. Penggalangan Dana Waben Bid. Pengelolaan Aset
	Mahkamah Tinggi Partai
	Mahkamah Partai
	Dewan Pakar
	Dewan Pertimbangan

Sumber: diolah dari beberapa sumber

Pada tataran pusat, kepengurusan baru terbentuk pasca kongres pertama dengan 16 Ketua Bidang dan departemen, 4 Wasekjen, 2 bendahara, 1 mahkamah partai, 4 Mahkamah Tinggi Partai, 1 Dewan Pertimbangan, dan 1 Dewan Pakar. Struktur ini jauh berbeda dengan

kepengurusan lama yang hanya 13 pengurus sehingga sangat mencerminkan kepengurusan yang ideal untuk partai yang besar dan siap menghadapi Pemilu 2014.

Sedangkan pada tataran Daerah, restrukturisasi organisasi mencakup penambahan kepengurusan, rotasi, dan memperjelas pola koordinasi. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan struktur daerah agar sesuai dengan kebutuhan menuju Pemilu 2014 ataupun kebutuhan organisasi dalam jangka panjang. Namun, dalam waktu yang singkat pasca kongres, terdapat beberapa Ketua DPW yang dicopot dan diganti dengan orang baru seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 6.2: Pergantian Ketua DPW Pasca Kongres

No	DPW	Ketua DPW lama	Plt Ketua DPW	Ketua DPW Baru
1	Jawa Barat	Rustam Efendi	Ferry M. B.	Eka Santosa
2	DKI Jakarta	Armyn Goeltom	Ahmad Sahroni	M. Hariadi Anwar
3	Kalimantan Timur	Hamdani	Dinar	Ahmad Amins
4	Sumatera Selatan	Febuar Rahman	Irma Chaniago	Syahrial Usman
5	Sulawesi Selatan	Sanusi Ramadhan	Supiadin	Mubyl
6	Sulawesi Tengah	Yusuf Lakaseng	Prasetyo	Ahmad Ali
7	Sulawesi Barat	M. Yasim	-	Arifin Nurdin
8	Gorontalo	Masrun Yunus Rivai	IGK Manila	Makmun Djafaara
9	Maluku Utara	Mukti Baba	Zulfan Lindan	Ishak Naser
10	Maluku	M. Isa Raharusun	-	Hamdani Luturua

Sumber: diolah dari beberapa sumber

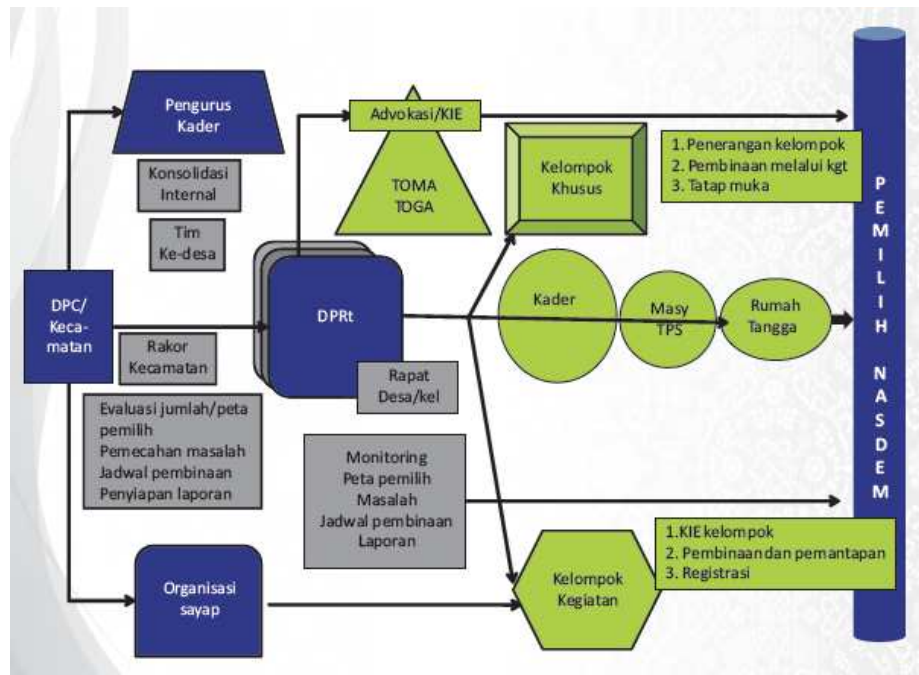
Kesepuluh Ketua DPW lama seperti yang terdaftar pada tabel di atas telah terindikasi positif menjadi gerbong Hary Tanoesudibyo. Oleh karenanya, terdapat pos-pos Ketua DPW yang kosong karena kesepuluh Ketua DPW tersebut mengundurkan diri sehingga perlu diisi oleh orang baru. Namun sebelum pergantian jabatan ketua, dilakukan pengisian jabatan dengan membuat Pelaksana Tugas (Plt) sementara. Hal ini dilakukan untuk kepentingan pola transisi kepengurusan sebelum pos tersebut diisi oleh Ketua dengan SK DPP. Terdapat beberapa tugas pokok Plt diantaranya adalah mengkonsolidasikan kader pada tataran DPRD dan DPC pasca kongres, membenahi organisasi di tingkatan DPW, dan mempersiapkan pergantian jabatan untuk Ketua DPW yang baru. Meski begitu, tidak semua melakukan proses transisi seperti ini. Dari 10 DPW hanya Maluku dan Sulawesi Barat yang tidak melalui peralihan jabatan dan langsung dilakukan penunjukan terhadap Hamdani Luturua sebagai Ketua DPW Maluku dan Arifin Nurdin sebagai Ketua DPW Sulawesi Barat.

Pembentukan struktur sampai pada tingkatan desa (DPRt) yang sebelumnya sudah berjalan, kemudian dilanjutkan kembali pasca kongres pertama Partai NasDem. Selain memang amanah di dalam AD/ART pasal 16 mengenai struktur partai, tujuan pembentukan struktur sampai tingkatan desa dan kelurahan ini juga untuk memperkuat basis pemilih. Firmanzah melihat bahwa kecenderungan pemilih saat ini lebih cenderung pada hubungan relasional, bukan lagi transaksional. Hubungan relasional ini harus dibangun di akar rumput supaya terjadi simbiosis mutualisme, yaitu hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Dengan begitu secara alami akan mempertahankan *electorate* untuk sekarang dan mendatang.

Hasil yang diharapkan dari tumbuhnya kader-kader organis di tataran akar rumput adalah mampu menciptakan bentuk pemilih yang rasional dan kritis. Hal ini bisa terjadi dimana nantinya pemilih ini memiliki orientasi yang tinggi pada kebijakan pemecahan masalah. Selain itu juga menciptakan pemilih yang mampu melihat program kerja atau platform partai yang berorientasi ke masa depan.²⁷

²⁷ Inco Hary Perdana. "Political Marketing Partai Politik Baru Menuju Pemilu 2014. Studi Kasus: Strategi Pemenangan Partai NasDem. Jakarta: Fisip Universitas Indonesia. 2012. hlm 100.

Mekanisme Penggerakan Massa di *Grass Roots*



Sumber: Materi Ideologi dan Restorasi Partai NasDem. hlmn 24

Di dalam bagan di atas, DPRt memiliki peran yang sangat strategis dalam menggerakkan massa pada tingkatan akar rumput. Pola koordinasi yang dibangun mencakup banyak hal termasuk berkoordinasi dengan DPC dalam sebuah Rapat Koordinasi mengenai evaluasi jumlah atau peta pemilih di masing-masing desa, pemecahan masalah yang ada di akar rumput, membuat jadwal pembinaan yang melibatkan seluruh kader pada tingkatan DPC sampai DPRt, serta mempersiapkan laporan baik berupa laporan keuangan, program atau laporan pertanggungjawaban. Selain itu DPRt juga mempunyai fungsi dalam pola koordinasi ketataran akar rumput dengan melaksanakan hasil dari rapat koordinasi dengan DPC dalam sebuah program strategis. Hal ini bisa dilihat pada bagan diatas bahwa di tingkatan DPRt, dimana kelompok kerja dibagi menjadi tiga. *Pertama* adalah kelompok khusus yang melakukan advokasi dan juga komunikasi politik dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Kelompok ini bertugas untuk sosialisasi mengenai Partai NasDem, melakukan pembinaan melalui kegiatan-kegiatan warga, serta melakukan intensitas pertemuan dengan masyarakat dan tokoh-tokoh setempat.

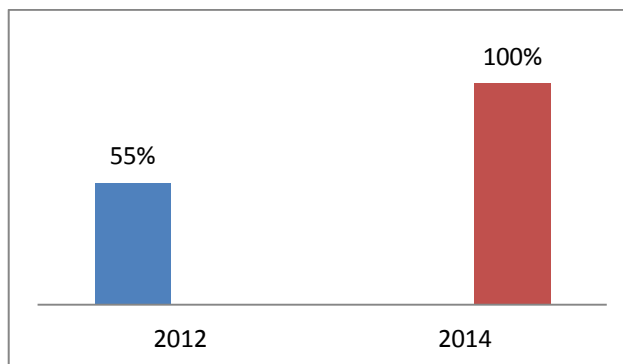
Kedua adalah kelompok kegiatan yang dibantu oleh organisasi sayap dari DPD atau DPC yang turun langsung ke Desa atau Kelurahan. Kelompok ini bertugas untuk pembinaan dan pemantapan pada setiap kader ataupun masyarakat mengenai nilai-nilai dan platform partai, menyelenggarakan registrasi bagi anggota baru partai, serta berkoordinasi dengan kelompok-kelompok masyarakat dalam lingkungan Desa dan Kelurahan. *Ketiga* adalah fungsionaris DPRt sendiri yang mempunyai tugas dalam membina kader dengan baik melalui komunikasi politik, pendidikan kader, serta bertanggung jawab penuh terhadap operasional di Tempat Pemungutan Suara.

Ketiganya merupakan kelompok yang mampu menggerakkan “mesin” partai pada tataran *grass root* hingga saat perhitungan suara di TPS. Fungsi mereka yang menjadikannya sebagai organ vital partai, oleh karenanya di dalam AD/ART pasal 16 diatur mengenai pembentukan struktur sampai Desa dan Kelurahan.

Inco Hary Perdana dalam tesisnya yang berjudul *Political Marketing Partai Politik Bagu Menuju Pemilu 2013, Studi Kasus: Strategi Pemenangan Partai Nasdem* menyebutkan bahwa pembentukan kepengurusan sampai pada tingkatan Desa dan Kelurahan merupakan bagian dari strategi Partai NasDem. Secara khusus juga ia mengistilahkannya sebagai *push political marketing*

dimana pesan politik disampaikan oleh partai atau kandidat secara langsung kepada publik. Dengan pembentukan struktur sampai tingkat Desa dan Kelurahan maka diharapkan komunikasi politik dan propaganda-propaganda politik akan sampai langsung pada pemilih.

Diagram 6.1: Komparasi Realisasi Pembentukan Struktur DPRt Partai NasDem



Sumber: Diolah dari beberapa sumber

Dalam sebuah wawancara antara Inco dan Ahmad Rofiq pada tahun 2012 yang kala itu masih menjadi Sekjen Partai NasDem, jumlah kepengurusan sampai tahun 2012 kurang lebih 55%²⁸. Jumlah tersebut merupakan langkah awal dimana ketika itu peraturan tambahan dalam Undang-undang No. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD baru keluar. Pada pasal 8 ayat 2(f) tersebut mensyaratkan partai politik harus mempunyai keanggotaan 1000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik. Di tahun 2014 Partai NasDem mampu merealisasikannya menjadi 100% kepengurusan DPRt. Hal ini didasari pada amanah kongres yang termaktub dalam AD/ART pada pasal 16.

Kesimpulan

Partai NasDem lahir tidak ubahnya seperti partai-partai pada umumnya di Indonesia yang tumbuh menjamur pasca reformasi. Namun hal tersebut dinilai sebuah kewajiban karena dalam konstitusi Indonesia menjamin kebebasan politiknya, termasuk membentuk partai politik. Bagi sebagian orang, partai NasDem adalah harapan baru dan semangat baru untuk menuangkan idealisme untuk membangun peradaban baru dalam sebuah gagasan politik “restorasi Indonesia. Namun sebagian juga mempunyai kepentingan politis sehingga semangat ini sebagai moda hingga terbentuknya partai yang kuat namun menyimpan benih-benih friksi dan konflik didalamnya. Oleh karena itu, pada bab ini mencoba mengutarakan beberapa poin penting yang dibagi kedalam fase-fase pelebngaan Partai NasDem memiliki kekhasan tersendiri.

Pertama, terdapat alasan-alasan pendukung yang bisa diperdebatkan ketika berbicara perjalanan Partai NasDem. Dalam perspektif pragmatis, Partai NasDem merupakan bentuk fragmentasi dari Partai Golkar dimana Surya Paloh bernaung lebih dari 43 tahun. Pasca konvensi Calon Presiden Partai Golkar, justru Prabowo dan Wiranto memilih untuk membentuk partai politik. Hal ini pula yang dilakukan oleh Surya Paloh dengan membentuk partai NasDem setelah rentetan politik yang ia alami pasca Munas ke 7 di Bali dan Munas ke 8 di Riau. Sedangkan dalam perspektif idealis, Partai NasDem lahir dari perjalanan politik Surya Paloh dan gagasan politiknya mengenai Restorasi Indonesia. Belakangan, gagasan politik itu menjadi sebuah *guide line* bagi dua organisasi besar yaitu Ormas Nasional Demokrat dan Partai NasDem. Restorasi Indonesia dinilai sebagai sebuah gerakan sosial yang menandakan kembalinya politik gagasan ditengah-tengah fragmatismya partai politik saat ini. Sehingga, dalam perjalanannya Partai NasDem mendapatkan atensi yang cukup baik dari masyarakat.

Kedua, melihat dari akar sejarahnya Partai NasDem harus menghadapi banyak hal termasuk menghadapi polarisasi di tubuh Ormas Nasional Demokrat. Hal ini dikarenakan isu

²⁸ Inco Hary Perdana. *Ibid.* hlm 101

pembentukan partai politik selalu menjadi isu yang sensitif di tubuh Ormas selama pembentukan Ormas Nasional Demokrat. Oleh karenanya hampir seluruh pengurus Ormas Nasional Demokrat mempertanyakan perihal terbentuknya Partai NasDem secara “tersembunyi”. Namun, atas dukungan Surya Paloh yang kuat, Partai NasDem mampu melalui resistensi dari Ormas. Meski begitu dampaknya adalah pengunduran diri Sri Sultan Hamengkubuwono dan beberapa pengurus pada tingkatan wilayah dan DPD.

Ketiga, partai NasDem adalah satu-satunya partai baru yang lolos sebagai partai politik peserta Pemilu 2014. Hal ini tidak mudah bagi partai baru karena ketatnya syarat dan ketentuan teknis yang tertuang di dalam UU No. 2 tahun 2011 tentang partai politik dan UU no 8 tahun 2012 tentang Pemilu DPR RI, DPRD, dan DPD. Uniknya, Partai NasDem mampu melewati tahapan demi tahapan hingga akhirnya pada tanggal 6 Maret 2013 ditetapkan oleh KPU menjadi partai politik peserta Pemilu oleh KPU dan Kemenkumham melalui surat resminya Nomor : M.HH-03.AH.11.01 TAHUN 2013. Di dalam surat tersebut juga meresmikan Partai NasDem dengan nomor urut 1.

Cerita kesuksesan dari Partai NasDem tersebut memang tidak bisa dipungkiri berkat ditunjangnya oleh para tokoh yang berpengalaman dalam mengurus partai politik. Selain Surya Paloh ada beberapa nama yang memang memiliki latar belakang politisi yang sudah malang melintang di kancah politik. Adalah Patrice Rio Capella, Ahmad Roffiq, dan Sugeng Suparwoto yang langsung memimpin secara teknis dari awal hingga lolos verifikasi KPU. Patrice Rio Capella sebelumnya adalah kader Partai Amanat Nasional (PAN) yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lampung. Sedangkan Ahmad Roffiq merupakan mantan Ketua Umum PP Mahasiswa Muhammadiyah, pernah juga sebagai kader Partai Amanat Nasional hingga akhirnya mendirikan partai baru Partai Matahari Bangsa (PMB). Dan Sugeng Suparwoto adalah jurnalis senior Koran Prioritas dan Metro TV.

Keempat resistensi dan konflik juga bagian yang penting dalam proses pelebagaan Partai NasDem. Pada awal pembentukan, resistensi muncul dari internal Ormas Nasional Demokrat yang kurang menyambut pembentukan Partai NasDem. Walau beragam tanggapannya, akan tetapi resistensi tersebut memiliki implikasi yang paling buruk bagi dua organisasi yang sama-sama sedang membangun kepercayaan publik. Ormas Nasional Demokrat mulai ditinggalkan para kadernya seiring mundurnya Sri Sultan Hamengkubuwono X. Sedangkan Partai NasDem sebagai entitas yang berbeda dari Ormas mengalami masa-masa sulit ketika dukungan dari Ormas Nasional Demokrat hanya 15%. Namun, permasalahan tersebut tidak menjadi soal terlebih Partai NasDem membuktikan mampu lolos pada verifikasi Kemenkumham dan KPU. Pada fase berikutnya, konflik kepentingan terjadi antara kubu Harry Tanoesudibyo dan Surya Paloh. Konflik tersebut terjadi pada pra Kongres Pertama Partai yang terdiri dari beberapa motif politik pasca wacana pengusungan Surya Paloh sebagai Ketua Umum pada Kongres.

REFERENSI

- Aditya, Willy. 2012. *Mari Bung Rebut Kembali*. Jakarta: Media Indonesia Publishing.
- Aditya, Willy. 2013. *Indonesia di Jalang Restorasi*. Jakarta: Populis Institute.
- Apter, David E. 1987. *Pengantar Analisa Politik*. Jakarta: LP3ES.
- Budiarjo, Miriam. 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan. 2012. *Penelitian Kualitatif (ed 2)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chadwick, Bruce A. et al. 1991. *Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Denzin, Norman K., Yvona S. Lincoln. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Herdiansyah, Haris. 2012 *Metodologi Penelitian Kualitatif unuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Hunika.
- Ishiyama, John T. Marjke Breuning. 2013. *Ilmu Politik dalam Paradigma Abad 21*. 2013. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Marsh, David. Gerry Stoker. 2011. *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*. Bandung: Nusa Media.
- Prastowo. Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Pratama, Dedi Zilkarnain. 2013. *Modalitas dalam Kemenangan Petahana pada Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013*. Fisip Universitas Brawijaya.
- Peters, Guy. 1999. *Institutional Theory in Political Science, The Institutionalism*. New York: Continuum.
- Strauss, Anselm. Juliet Corbin. 2013. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Usamah Hisyam. 2014. *Surya Paloh-Matahari Restorasi Sang ideologi*. Jakarta: PT. Dharmapena Citra Media.
- Vredenburg, J. 1983. "Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat". Jakarta: PT Gramedia

Yudistira. 2013. "Laporan Praktik Kerja Nyata, O250 Sebagai Strategi dan Taktis Suksesi Pemilu 2014 Partai NasDem" FISIP Universitas Brawijaya.

Penetapan-penetapan

Hasil Rekapitulasi Verifikasi Faktual Partai Politik tertanggal 8 Januari 2013 dengan No 05/BA/I/2013

Surat Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013

AD/ART PARTAI NASDEM

Rekapitulasi jumlah kader Partai NasDem dari sistem database online O250 per 12 Agustus 2013

Jurnal

Scott, W. Richard. 2004 "*Institutional Theory: Contributing to a theoretical research program*". Stanford university

March, James G., Johan P. Olsen. 2005 "Elaborating The New Institutionalism". No. 11 Arena, Centre for European Studies University of Oslo

March, James G., Johan P. 1984 Olsen. "*The American Political Science Review*" 1984. Vol. 78, No. 03

Hall, Peter A., Rosemary C. R. Taylor. 1996 "Political Science and the Three New Institutionalisms"

Guel, Evrim. _____. "*Turkey and the West: Change in Continuity? A Two-way Approach to Turkey's Relations with the West*". Lund University Departement of Political Science

Aoki, Masahiko. 1998 "*The Subjective Game From and Institutional Evolution as Punctuated Equilibrium*". Standford University

Website:

Diakses dari laman Web <http://politik.kompasiana.com/2011/07/09/nasdem-sebagai-ormas-dan-partai-politik-377478.html>, pada tanggal 1 Maret 2014

Diakses dari laman web <http://www.gatra.com/fokus-berita/23575-perang-petinggi-partai-nasdem.html>, pada tanggal 1 Maret 2014

Diakses dari laman web <http://news.detik.com/read/2013/01/25/071414/2151694/10/para-pengurus-partai-nasdem-dki-dan-jakarta-roya-mundur>, pada tanggal 2 Maret 2014

Diakses dari laman web <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/01/30/mhfhq1-ramairamai-kader-nasdem-mengundurkan-diri-ini-alasannya>, pada tanggal 2 Maret 2014

Diakses dari laman web <http://www.merdeka.com/pemilu-2014/potret/15-pengurus-badan-hukum-partai-nasdem-mengundurkan-diri.html>, pada tanggal 3 Maret 2013

Diakses dari laman web <http://news.okezone.com/read/2013/01/27/339/752401/garda-pemuda-nasdem-dki-jakarta-mundur-massal>, tanggal 5 Maret 2014

Diakses dari laman web <http://news.detik.com/read/2012/09/16/181158/2021048/10/2/rachmawati-soekarnoputri-resmi-gabung-partai-nasdem> , tanggal 12 Maret 2014.

Diakses dari laman web <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/01/09/posisi-5-di-survei-nasdem-optimistis-tembus-tiga-besar> yang diunduh tanggal 4 Maret 2014.

Diakses dari laman web
<http://nasional.kompas.com/read/2014/01/09/1417107/Survei.Kompas.Hanya.Nasdem.dan.Hanura.Mencorong.di.Parpol.Menengah>, tanggal 5 Maret 2014

Diakses dari laman web <http://www.jpnn.com/read/2014/01/09/210034/Geser-Partai-Papan-Tengah,-NasDem-Incar-Posisi-Tiga-Besar->, tanggal 6 Maret 2014

Diakses dari laman web <http://beta.partainasdemo250.org/partai/page/2>. diakses pada Selasa 22 Oktober 2013

Diakses dari laman web
<http://nasional.kompas.com/read/2013/01/08/02572488/KPU.Hanya.10.Parpol.yang.Penuhi.Syarat.untuk.Pemilu.2014> pada 27 September 2013